

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Munawar. (2006). *Manajemen lalu lintas perkotaan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- B.C Smith. (2007). *Good governance and development*. Palgrave Macmillan.
- Koswara. (2000). *Menyongsong pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999*. Jakarta: CSIS.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Stanton, William J. (2009). *Prinsip pemasaran (Jilid I)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Jurnal

- Andiyan, A., & Rachmat, A. 2021. *Telaahan Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pembangunan Bandara Kertajati Di Jawa Barat*. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 7(2): 413-424.
- Aryani, Desi Yuli, & Rahdriawan, Mardwi. (2016). *Kajian peluang kerja sama pemerintah swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.
- Hoessein, Benyamin. (2001). *Prospek resolusi kebijakan dan implementasi otonomi daerah dari sudut pandang hukum tata negara*. Jakarta: LAN.

- Maulana, M. R. 2021. *Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 5(1).
- Mubasari, Rora Arina, & Martini, Rina. (2021). *Kemitraan Pemerintah Kota Semarang dengan PT. GoJek Indonesia sebagai penyedia layanan Go-Pay untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang*. Journal of Politics and Government Studies, Universitas Diponegoro.
- Nikmah, Imas Ulin. (n.d.). *Kajian permasalahan komunikasi dan kerja sama pemerintah daerah: Analisis kerugian BRT Trans Semarang Koridor 2 setelah pengoperasian BRT Trans Jateng Koridor 1*. Journal of Politics and Government Studies, 8.
- Nurmayasari, Alfina, Erowati, Dewi, & Herawati, Nunik Retno. (n.d.). *Analisis permasalahan kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran uang elektronik melalui Go-Pay (studi penelitian: pada Bus Rapid Transit Trans Semarang)*. Journal of Politics and Government Studies, 13(1).
- Nisjar, S., & Karhi. (1997). *Beberapa catatan tentang good governance*. Jurnal Administrasi dan Pembangunan, 1(2), 119.
- Riawan, Weldy Anugra. (2018). *Analisis pelayanan bus rapid transit kapasitas sedang pada sistem transportasi perkotaan*. Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Nijkamp, P., van der Burch, M., & Vindigni, G. (2002). *A comparative institutional evaluation of public-private partnerships in Dutch urban land-use and revitalisation projects*. Urban Studies, 39(10), 1865–1880.
- Yehezkiel-Devanno, S. 2023. *Analisis Kerja Sama Pemerintah Kota Semarang Dan Pt. Go-Jek Indonesia Dalam Menyediakan Pembayaran Go-Pay Untuk BRT Trans Semarang Sebagai Langkah Peningkatan Layanan Publik*. Journal Of Politic And Government Studies 12(3): 595-604.

Website

- AstraPay. (n.d.). Home. Retrieved from <https://www.astrapay.com/home>.
- Foreign and Commonwealth Office. (2012). The Foreign and Commonwealth Office digital strategy. London: HM Government. Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/39629/AB_12-11-14_Digital_strategy.pdf.
- Rosyadi, Khalid. (2010). Public private partnership. Retrieved from https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UQ5y61pgZwQJ:https://www.academia.edu/7437379/Public_Private_Partnership+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id.
- Kementerian Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). Susunan organisasi dinas. Retrieved from <https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/susunan-organisasi-dinas>.
- Kurniawan, Ferry Made. (2019). Permainan rakyat sebagai sumber belajar sosiologi SMA (studi kasus tradisi Mageburan di desa adat Sekumpul, Swan, Buleleng, Bali). (Skripsi). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Undang-Undang Dan Peraturan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).
- Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009.
- Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2003). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Laporan dan Dokumen Internasional

Asian Development Bank. (2008). *Emerging Asian regionalism: A partnership for shared prosperity*. Mandaluyong City, Filipina.

Bult-Spiering, M., & Dewulf, G. (2006). *Strategic issues in public-private partnerships: An international perspective*. Oxford, U.K.: Blackwell Publishing.

Economic Commission for Europe United Nations. (2008). *Spatial planning: Key instrument for development and effective governance with special reference to countries in transition*. United Nations, New York and Geneva.

United Nations Development Programme. (2004). *Indonesian human development report 2004*.

America's National Council on Public Private Partnership. (2010). *Public private partnership*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi



Foto Terminal penggaron



Foto Terminal Bawen



Foto Terminal Magelang



Foto Terminal Bawen



Wawancara Pihak Dinas Perhubungan



Wawancara Dengan Pengguna BRT

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suryono
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 02100/UN7.F7/PP/X/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
JL.SILIWANGI NO.357, KRAPYAK,
KECAMATAN SEMARANG BARAT,KOTA
SEMARANG, JAWA TENGAH 50146

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada HENGGAR BUDI ANGGORO, ST,MT. JABATAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : NIKMATUL HIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14010118130107
Judul : ANALISIS PENGELOLAAN BRT TRANS JATENG TAHUN 2023 STUDI KASUS KERJA SAMA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN PT ASTRA DIGITAL ARTA (ASTRAPAY)
Alamat Rumah : KALIRANDUGEDE
Alamat Email : nikmatulhikmah333@gmail.com
Nomor Telepon : 0895602510480

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 17 Oktober 2024



Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Judul Penelitian	Analisis Kemitraan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan PT Astra Digital Arta (ASTRAPAY) Dalam Pembayaran BRT Trans Jateng Tahun
Dosen Pembimbing	1. Neny Marlina, S.IP., M.A.

I. Identitas Pewawancara

1. Nama : Nikmatul Hikmah
2. Alamat : Desa Kalirandugede RT 02 RW 03 Cepiring Kendal

II. Identitas Informan

1. Nama : Bayu Pramono Jati
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Kepala Seksi Operasional Balai Transportasi JawaTengah di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

III. Jadwal dan Lokasi Wawancara

1. Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2024
2. Tempat : Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

IV. Pertanyaan dan Jawaban

1. **Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nikmatul Hikmah dari Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Saya bertujuan untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber dari penelitian saya yang mewakili dari Bapak Kepala Dinas. Mohon perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, beserta jabatan dan tugasnya dalam Balai Transportasi ini.**

Saya Bayu Pramono Jati, saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional Balai Transportasi Jawa Tengah di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Saya memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan operasional TransJateng.

2. **Penelitian saya terkait kerja sama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan PT Astra Digital Arta, yang berarti masuk dalam aplikasi Si Anteng. Bagaimana metode pembayaran non-tunai dibandingkan dengan tunai di PRT TransJateng?**

Saat ini di PRT TransJateng tersedia dua metode pembayaran, yakni tunai dan non-tunai. Untuk non-tunai, selain menggunakan Astra Pay, kita juga mendukung berbagai metode lain seperti QRIS yang bisa digunakan dengan semua dompet digital, kartu multitrip dari PT KCI untuk koridor Solo dan Magelang, serta kartu Brizzi, Tap Cash, E-Money, dan Flash. Di BRT Transjateng itu sebenarnya kita untuk saat ini ada metode pembayaran tunai dan non-tunai. Non-tunainya itu selain dari Astra Pay, kita juga bisa membayar dengan QRIS, kartu multitrip PT KCI, serta e-money seperti Brizzi, TapCash, Flash, dan e-Money

3. Dari segi jumlah penggunaan, bagaimana perbandingan antara pembayaran tunai dan non-tunai?

Sebagian besar penumpang masih menggunakan tunai. Penggunaan non-tunai saat ini sekitar 5,92% dari total penumpang. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Jawa Tengah yang masih terbiasa dengan uang tunai.

4. Apakah ada upaya untuk meningkatkan penggunaan metode non-tunai?

Ya, kami mendorong transaksi non-tunai melalui berbagai promo, seperti cashback 70% untuk pembayaran menggunakan Astra Pay melalui aplikasi Si Anteng. Program ini berlangsung dari Juli hingga 31 Oktober kemarin. Jadi untuk yang cashback 70% itu khusus untuk pembelian tiket melalui SiAnteng dengan Astra Pay

5. Bagaimana proses cashback 70% ini? Apakah ada syarat tertentu?

Syaratnya hanya satu, yaitu menggunakan Astra Pay saat membeli tiket melalui Si Anteng. Tidak ada minimal transaksi, pengguna cukup membayar tarif normal dan langsung mendapatkan cashback.

6. Bagaimana awal mula kerja sama antara BRT TransJateng dengan Astra Pay? Apakah pihak Dinas yang menghubungi lebih dulu atau sebaliknya?

Pihak Astra Pay yang mengajukan proposal kerja sama ke kami. Mereka melihat peluang di TransJateng karena saat ini memiliki tujuh koridor dengan rata-rata 27 ribu penumpang per hari. Setelah melalui pembahasan dan diskusi, akhirnya disepakati bentuk kerja sama dalam perjanjian teknis.

7. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, apakah ada dampak signifikan dari penggunaan Astra Pay?

Dari sisi pemerintah, meningkatnya pembayaran non-tunai akan meningkatkan akuntabilitas keuangan, mengurangi uang tunai yang beredar, serta meminimalkan potensi kebocoran dana. Dari sisi pengguna, mereka lebih dimudahkan karena bisa membeli tiket terlebih dahulu dan hanya perlu melakukan scan saat naik bus. Kalau dari sisi pemerintah, semakin tinggi pembayaran non-tunai maka akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin meningkat

8. Setelah adanya kerja sama ini, apakah ada peningkatan dalam jumlah pengguna pembayaran non-tunai?

Ya, meskipun masih bertahap, ada peningkatan sekitar 1% setiap bulan. Peningkatan lebih signifikan terjadi saat ada promo. Dalam PKS ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk persentase atau nominal kepada pemerintah. Semua pendapatan dari tarif masuk langsung ke pemerintah provinsi tanpa ada potongan

9. Bagaimana pembagian keuntungan dari kerja sama ini? Apakah ada persentase tertentu?

Tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk nominal karena ini adalah kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam skema B to G (Business to Government). Semua tarif tetap mengacu pada peraturan gubernur, sehingga tidak ada pembagian hasil ke pihak swasta. Dalam PKS ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk persentase atau nominal kepada pemerintah. Semua pendapatan dari tarif masuk langsung ke pemerintah provinsi tanpa ada potongan

10. Apakah ada perubahan dari sisi sumber daya manusia atau alat setelah kerja sama ini?

Tidak ada perubahan alat, tetapi ada perubahan pada SOP. Petugas bus kini diwajibkan menawarkan pembayaran non-tunai terlebih dahulu dan memastikan uang tunai yang digunakan adalah uang pas. Petugas di dalam bus sekarang harus menawarkan terlebih dahulu pembayaran non-tunai kepada penumpang sebelum menerima uang tunai

11. Apakah ada program promo serupa yang akan dilakukan di masa depan?

Ya, kami rutin mengadakan promo setiap tahun dalam momen-momen tertentu, seperti Hari Kemerdekaan, Hari Perhubungan Nasional, dan Sumpah Pemuda.

12. Jika masyarakat ingin memberikan aduan atau kritik terkait Astra Pay, melalui kanal apa saja mereka bisa menyampaikannya?

Kami memiliki delapan kanal aduan, yaitu telepon, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Lapor.go.id, aplikasi Si Anteng, serta media sosial lainnya. Semua aduan akan ditindaklanjuti sesuai dengan klasifikasinya.

13. Baik, cukup jelas. Jika nanti ada kebutuhan data tambahan, apakah bisa dikirim melalui email?

Bisa. Kami memiliki data real-time mengenai penggunaan Astra Pay, dan jika diperlukan, dapat dikirimkan melalui email.

I. Identitas Pewawancara

1. Nama : Nikmatul Hikmah
2. Alamat : Desa Kalirandugede RT 02 RW 03 Cepiring

II. Identitas Informan

1. Nama : Syakira Ayu
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Jabatan : Pengguna BRT (Penumpang)

III. Jadwal dan Lokasi Wawancara

1. Hari/Tanggal : Sabtu, 23 November 2024
2. Tempat : Halte BRT Koridor III

IV. Pertanyaan dan Jawaban**1. Bagaimana Anda mengetahui tentang kerja sama antara BRT Trans Jateng dan Astrapay?**

Saya mengetahui tentang kerja sama ini melalui media sosial dan informasi yang dipasang di halte-halte Trans Jateng. Di beberapa iklan, juga disebutkan bahwa Astrapay akan menjadi metode pembayaran baru untuk tiket BRT.

2. Apakah Anda sudah mencoba menggunakan Astrapay untuk pembayaran tiket BRT?

Saya kira saya akan merasa lebih nyaman menggunakan Astrapay jika saya sudah terbiasa, tetapi saat ini saya lebih memilih menggunakan pembayaran tunai karena lebih jelas dan tidak membutuhkan teknologi. Jika penggunaan Astrapay semakin populer, saya rasa jumlah pengguna BRT Trans Jateng bisa meningkat, tetapi saya juga khawatir ada masyarakat yang kesulitan beradaptasi dengan sistem pembayaran digital ini. Mungkin saja bagi sebagian orang, terutama yang belum terbiasa dengan teknologi, kerja sama ini agak membingungkan, dan akan lebih baik jika ada pendampingan atau pelatihan untuk memudahkan penggunaan Astrapay.

3. Apa kelebihan dan kekurangan Astrapay dibandingkan dengan pembayaran tunai?

Menurut saya, kelebihan Astrapay adalah lebih praktis karena tidak perlu membawa uang tunai atau repot mencari kembalian. Selain itu, dengan pembayaran digital, transaksi bisa lebih cepat dan mengurangi antrean di loket. Namun, kekurangannya adalah tidak semua orang memiliki atau terbiasa menggunakan aplikasi dompet digital. Selain itu, ada risiko kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil atau saldo yang tidak mencukupi saat ingin membayar.

4. Apakah Anda merasa sistem ini memudahkan atau justru menyulitkan pengguna?

Bagi saya pribadi, sistem ini cukup memudahkan jika sudah terbiasa, tetapi bagi orang yang tidak akrab dengan teknologi, mungkin akan menjadi tantangan. Banyak masyarakat, terutama yang sudah lanjut usia, mungkin lebih nyaman menggunakan uang tunai karena sudah terbiasa. Jadi, penerapan Astrapay sebaiknya dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi agar semua penumpang bisa memahami cara menggunakannya dengan mudah.

5. Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam jumlah pengguna BRT sejak kerja sama ini diterapkan?

Saya belum melihat perubahan yang signifikan dalam jumlah pengguna. Namun, saya rasa jika sistem ini semakin dikenal dan terbukti lebih praktis, maka jumlah penumpang bisa meningkat. Sebaliknya, jika terlalu banyak kendala teknis atau masyarakat merasa kesulitan menggunakannya, justru bisa menurunkan minat orang untuk naik BRT.

6. Apa harapan Anda terkait penerapan Astrapay sebagai metode pembayaran tiket BRT?

Saya berharap sistem ini bisa diterapkan secara lebih luas tetapi tetap mempertimbangkan kemudahan bagi semua pengguna. Mungkin perlu ada sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat, terutama bagi yang belum terbiasa dengan pembayaran digital. Selain itu, sebaiknya tetap disediakan opsi pembayaran tunai untuk mereka yang masih merasa kesulitan menggunakan Astrapay.

I. Identitas Pewawancara

1. Nama : Nikmatul Hikmah
2. Alamat : Desa Kalirandugede RT 02 RW 03 Cepiring

II. Identitas Informan

1. Nama : Rokhmat Khakiki
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Pengguna BRT (Penumpang)

III. Jadwal dan Lokasi Wawancara

1. Hari/Tanggal : Sabtu, 23 November 2024
2. Tempat : Halte BRT Koridor III

IV. Pertanyaan dan Jawaban

1. Menurut Anda, bagaimana dampak kerja sama ini terhadap pengguna BRT?

Saya kira kerja sama ini bisa memberi dampak positif kalau memang bisa membuat proses pembayaran lebih cepat dan mudah, tapi saya belum bisa mengomentari secara langsung karena belum menggunakan Astrapay.

2. Bagaimana pendapat Anda tentang manfaat penggunaan Astrapay bagi pengguna BRT?

Saya rasa kerja sama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama penumpang BRT, karena mengurangi penggunaan uang tunai dan mempercepat proses pembayaran, serta mengurangi risiko kerugian jika uang hilang. Saya merasa lebih nyaman menggunakan Astrapay karena tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai atau mengantre untuk membeli tiket. Ini juga lebih praktis karena saldo sudah tersedia di ponsel.

3. Apa kendala yang mungkin dihadapi pengguna dalam menerapkan sistem pembayaran digital ini?

Menurut saya, kendala utama adalah kesiapan masyarakat dalam beralih ke sistem digital. Tidak semua orang memiliki ponsel yang kompatibel atau akses internet yang stabil. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait keamanan transaksi dan kemungkinan saldo yang tidak terbaca atau error saat digunakan.

4. Apakah Anda merasa penggunaan Astrapay lebih efisien dibandingkan dengan pembayaran tunai?

Saya pribadi merasa lebih efisien karena prosesnya lebih cepat dan tidak perlu mencari uang pas atau menunggu kembalian. Namun, bagi

mereka yang tidak terbiasa dengan pembayaran digital, mungkin perlu waktu untuk beradaptasi.

5. Bagaimana cara menurut Anda agar masyarakat lebih mudah menerima sistem ini?

Saya rasa perlu adanya sosialisasi yang lebih luas, mungkin dengan pemasangan petunjuk penggunaan di halte atau bus, serta pelatihan singkat bagi masyarakat yang belum familiar dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, bisa juga diberikan promo atau diskon untuk menarik lebih banyak pengguna agar mau mencoba.

6. Apa harapan Anda terkait penerapan Astrapay sebagai metode pembayaran tiket BRT?

Saya berharap sistem ini semakin disempurnakan dan tetap memberikan alternatif bagi yang masih ingin menggunakan pembayaran tunai. Selain itu, harus ada peningkatan layanan dalam hal keamanan transaksi dan kemudahan pengisian saldo agar lebih praktis bagi pengguna.

I. Identitas Pewawancara

1. Nama : Nikmatul Hikmah
2. Alamat : Desa Kalirandugede RT 02 RW 03 Cepiring

II. Identitas Informan

1. Nama : Liatul Khikmah dan Fitkhi Alfarizi
2. Jenis Kelamin : Perempuan dan Laki-laki
3. Jabatan : Pengguna BRT (Penumpang)

III. Jadwal dan Lokasi Wawancara

1. Hari/Tanggal : 24 November 2024
2. Tempat : Halte BRT Koridor III

IV. Pertanyaan dan Jawaban

1. Apakah Anda sudah pernah menggunakan Astrapay untuk membayar tiket BRT? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?

Liatul Khikmah: Ya, saya sudah pernah menggunakan Astrapay untuk membayar tiket BRT Trans Jateng. Sangat praktis, tinggal scan QR code dan langsung terbayar. Pengalaman saya menggunakan Astrapay sangat memuaskan. Prosesnya cepat, tinggal buka aplikasi, pilih saldo, dan scan kode QR. Tidak ada kesulitan yang berarti. Saya tidak mengalami masalah berarti saat menggunakan Astrapay, tapi ada beberapa kali saat aplikasi agak lambat atau tidak bisa connect dengan jaringan, yang menyebabkan saya harus menunggu sebentar.

2. Menurut Anda, apa keuntungan menggunakan Astrapay dibandingkan dengan pembayaran tunai?

Liatul Khikmah: Keuntungannya jelas, lebih praktis dan cepat. Kita tidak perlu membawa uang tunai, mencari kembalian, atau mengantre lama di loket. Selain itu, penggunaan Astrapay juga lebih higienis karena tidak perlu menyentuh uang secara langsung, yang bisa mengurangi risiko penyebaran penyakit.

3. Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk memperkenalkan Astrapay kepada lebih banyak pengguna BRT?

Liatul Khikmah: Saya rasa sosialisasi harus diperbanyak, misalnya melalui media sosial, iklan di halte, atau pengumuman di dalam bus. Mungkin juga bisa ada petugas yang membantu penumpang memahami cara menggunakan Astrapay, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan pembayaran digital. Jika ada promo atau diskon khusus untuk pengguna Astrapay, itu bisa menarik lebih banyak orang untuk mencoba.

4. Apakah Anda sudah mencoba menggunakan Astrapay untuk pembayaran tiket BRT?

Fitkhi Alfarizi: Saya belum pernah mencoba, jadi tidak bisa memberi komentar. Saya rasa mungkin agak bingung kalau harus menggunakan aplikasi untuk pembayaran tiket, karena saya lebih terbiasa dengan pembayaran tunai. Jika saya mengalami kesulitan, mungkin karena saya belum terbiasa dengan aplikasi pembayaran seperti itu, bisa jadi masalah jaringan atau kurang familiar dengan penggunaan aplikasi.

5. Apa kendala utama dalam penggunaan Astrapay sebagai metode pembayaran tiket BRT?

Fitkhi Alfarizi: Kendala utamanya bagi saya adalah faktor kebiasaan. Saya lebih terbiasa membayar dengan uang tunai dan belum begitu nyaman dengan transaksi digital. Selain itu, jika jaringan internet tidak stabil atau aplikasi mengalami gangguan, tentu bisa menyulitkan pengguna, terutama bagi yang sedang terburu-buru.

6. Apakah Anda merasa perlu ada alternatif pembayaran lain selain Astrapay?

Fitkhi Alfarizi: Ya, saya rasa sebaiknya tetap ada alternatif lain seperti pembayaran tunai atau kartu elektronik. Tidak semua orang bisa langsung beralih ke pembayaran digital. Masyarakat masih membutuhkan pilihan yang sesuai dengan kebiasaan mereka, terutama bagi orang tua atau mereka yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran.